LAPORAN BULANAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NTT

MEI
2025



badankeuanganprovntt@gmail.com

www.reallygreatsite.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih Karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Bulan Mei Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

Melalui Laporan Kinerja Bulanan Badan Keuangan Daerah ini diharapkan dapat mencerminkan kinerja Badan Keuangan Daerah selama Bulan Mei Tahun 2025, sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang berminat untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah.

Kami menyadari benar akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan program pemerintah dimaksud. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan terbuka.

Kupang, Juni 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. BENHARD MENOH,MT
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19720512 199101 1 001

`DAFTAR ISI

COVER
KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 1
1.3 Maksud Dan Tujuan 3
1.4 Organisasi dan Personalia 3
1.5 Sistematika Penyajian 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **7**
2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan Daerah 7
2.2 Target Kinerja 8
2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2025 10

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN **17**
3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian 17
A. Pelayanan Administrasi dan Umum 17
B. Kepegawaian 18
3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan 20
A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah 20
1. Realisasi Pendapatan 20
2. Realisasi Belanja 26
B. Kinerja Badan Keuangan Daerah 34
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 37

BAB IV PENUTUP **56**
4.1 Permasalahan dan Solusi 56
1. Sekretariat 56
2. Anggaran 57
3. Bidang Perbendaharaan 58
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 58
4. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota 58

BAB IV PENUTUP **61**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah 5

DAFTAR TABEL

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah 8
2.2 Penganggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2024 10
3.1 Rekapitulasi Surat Masuk 17
3.2 Rekapitulasi Surat Keluar 17
3.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsonal 18
3.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan 18
3.5 Komposisi Pegawai berdasarkan Agama 19
3.6 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Umum 19
3.7 Komposisi Tenaga Kontrak 20
3.8 Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan 20
3.9 Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah 26
3.10 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Anggaran 39
3.11 Hasil Pelaksanaa Tugas Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota 41
3.12 Hasil Pelaksanaa Tugas Bidang Perbendaharaan 47
3.13 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan 54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintah daerah di bidang keuangan.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan berbagai program kegiatan dan berbagai program kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar seluruh rencana program dan kegiatan dapat terealisasi, terarah dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Bulan Mei 2025 maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 yang diharapkan dapat menjadi informasi tentang kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan Akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Badan Keuangan Daerah dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang keuangan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)

d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;

j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006).

l. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024).

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Kinerja Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan dasar evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang guna peningkatan kinerja.

1.4 Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari :

a. Sekretariat, terdiri atas :
   1) Sub Keuangan
   2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
b. Bidang Anggaran, terdiri atas :
   1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
   2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
   1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
   2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
   1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
   2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
e. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
   1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
   2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

Gambar 1.1

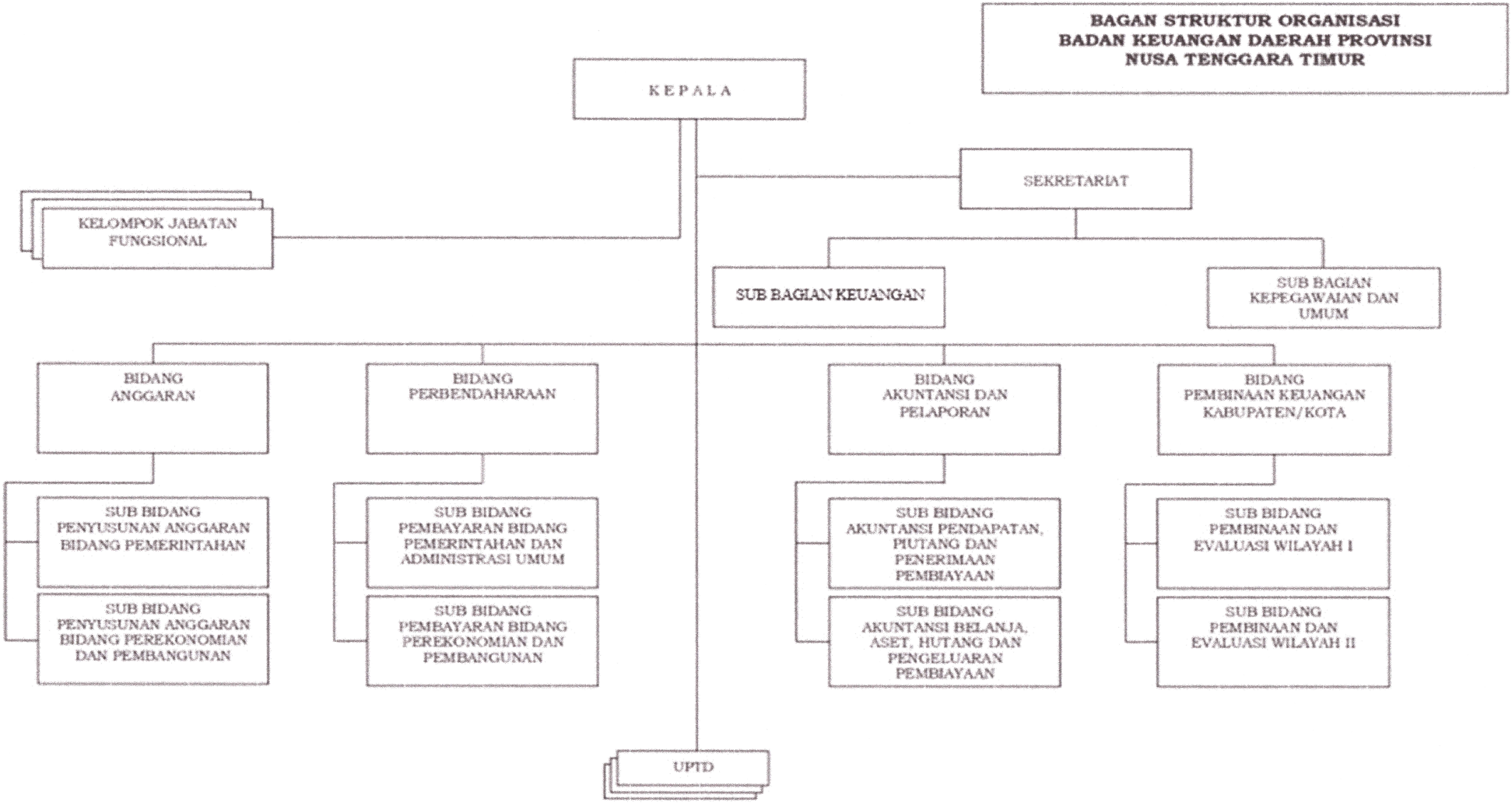
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
BIDANG ANGGARAN
BIDANG PERBENDAHARAAN
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BIDANG PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN
SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SUB BIDANG PEMBAYARAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM
SUB BIDANG PEMBAYARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SUB BIDANG AKUNTANSI PENDAPATAN, PIUTANG DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
SUB BIDANG AKUNTANSI BELANJA, ASET, HUTANG DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH I
SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH II
UPTD

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Kinerja Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Bulan Mei Tahun Anggaran 2025. Membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir dimaksud, sistematika penyajian Laporan Kinerja Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Organisasi dan Personalia

1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

2.2 Target Kinerja

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1 Permasalahan

4.2 Solusi

BAB V PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Target Kinerja

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan manajemen target kinerja jangka menengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN KEUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan	100 %
		2. Persentase Renperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	100 %

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	**APBD**		
a.	**Belanja (Program)**	**Rp. 686.415.955.776,-**	**Realisasi minimal 85%**
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 20.348.841.404.-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 666.067.114.372,-	Realisasi minimal 85%
b.	**Pendapatan**	**Rp. 3.416.135.171.857,-**	**Realisasi minimal 90%**
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	**Rp. 4.102.551.127.633,-**	**Realisasi minimal 90%**

2.	**APBN**			
a.	**Program Dekonsentrasi**	**Rp.**	-	-
	1. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	-	-
	2. Bina Administrasi Kewilayahan	Rp.	-	-
b.	**Program Tugas Pembantuan**	**Rp.**	-	-
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	**Rp.**	-	-

2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2025

Berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, penganggaran Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025

						KEUANGAN	**686.415.955.776**
0	0	0	2			Badan Keuangan Daerah	**686.415.955.776**
0	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.348.841.404
1	1	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401.244.096
1	1	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.246.000
1	1	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	91.310.800
1	1	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.903.727
1	1	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.433.569
1	1	0	1	0	8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	41.350.000
1	1	0	1	1	0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000
1	1	0	2			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.675.996.182**
1	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.184.296.582
1	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600
1	1	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000
1	1	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000
1	1	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.423.000

1	1	0	2	0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	65.519.000
1	1	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.509.000
1	1	0	2	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000
1	**1**	**0**	**3**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20.000.000**
1	1	0	3	0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000
1	1	0	3	0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
1	**1**	**0**	**5**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**232.158.000**
1	1	0	5	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141.079.000
1	1	0	5	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000
1	1	0	5	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-
1	1	0	5	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-
1	**1**	**0**	**6**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.455.980.242**
1	1	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.709.000
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.189.000
1	1	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	355.243.520
1	1	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.500.000
1	1	0	6	0	7	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000
1	1	0	6	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	424.792.286
1	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.640.000

1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436
1	**1**	**0**	**7**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**540.679.000**
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	38.824.000
1	1	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	501.855.000
1	**1**	**0**	**8**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.671.463.884**
1	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.565.400
1	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000
1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.886.898.484
1	**1**	**0**	**9**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**351.320.000**
1	1	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000
1	1	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.500.000
1	1	0	9	0	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-
0	2					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	666.067.114.372
2	**2**	**0**	**1**			**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**8.730.834.177**
2	2	0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	**301.751.000**
2	2	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	**344.547.000**
2	2	0	1	0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	147.314.000
2	2	0	1	0	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	367.722.800
2	2	0	1	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	**2.634.548.112**

2	2	0	1	0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.903.975.413
2	2	0	1	0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.030.975.852
2	2	0	2			**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	1.947.777.005
2	2	0	2	0	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-
2	2	0	2	0	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	406.438.000
2	2	0	2	0	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	407.968.000
2	2	0	2	0	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	452.694.000
2	2	0	2	0	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	579.470.500
2	2	0	2	0	6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	-
2	2	0	2	0	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	41.398.000
2	2	0	2	0	8	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDKabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	-
2	2	0	2	0	9	**Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang**	-

						Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	
2	2	0	2	0	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-
2	2	0	2	0	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-
2	2	0	2	0	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsilidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Deareh	59.808.505
2	2	0	3			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.766.443.797
2	2	0	3	0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	344.944.296
2	2	0	3	0	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	234.557.600
2	2	0	3	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	364.648.400
2	2	0	3	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	477.582.200
2	2	0	3	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	344.711.300

2	2	0	3	0	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-
2	2	0	4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.494.907.652
2	2	0	4	0	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-
2	2	0	4	0	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	330.735.212
2	2	0	4	0	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	423.726.990
2	2	0	4	0	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	733.939.150
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.006.506.300
2	2	0	4	0	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-
2	2	0	4	0	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	-
2	2	0	5			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	651.127.151.742
2	2	0	5	0	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484
2	2	0	5	0	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	39.242.079.847

2	2	0	5	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	**10.634.011.146**
2	2	0	5	0	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	**554.044.137.265**

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

A. Pelayanan Administrasi dan Umum

1. Surat Masuk

Tabel 3.1

Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

Per 31 Mei 2025

Unit	Jumlah Surat Masuk
Sekretariat	42
Bidang Anggaran	75
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	40
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	5
Bidang Perbendaharaan	65
Jumlah	**227**

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Surat Keluar

Tabel 3.2

Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

31 Mei 2025

Unit	Jumlah Surat Keluar
Sekretariat	84
Bidang Anggaran	6
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	20
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	15
Bidang Perbendaharaan	45
Jumlah	**170**

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

B. Kepegawaian

Keadaan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 63 orang, dengan perincian sebagai berikut (sampai dengan 31 Mei 2025).

1. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Tabel 3.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Kondisi 31 Mei 2025

NO	JABATAN	JUMLAH	TINGKATAN (eselon/ jenjang)	Ket
1.	Kepala Badan	0 orang	II-a	Tidak Ada
2.	Sekretaris	0 orang	III-a	Tidak Ada
3.	Kepala Bidang	3 orang	III-a	Ada
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	9 orang	IV-a	Ada
5.	Fungsional Tertentu	8 orang		Ada
6	Pelaksana	42 orang		
Total		**63 orang**		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Tabel 3.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Kondisi 31 Mei 2025

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			
		L	P	I	II	III	IV
1.	Sekretariat	6	6	-	1	10	1
2.	Bidang Anggaran	7	4	-	-	8	3
3.	Bidang Perbendaharaan	3	10	-	-	13	0
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	3	10	-	-	11	3
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	8	6	-	1	10	2
Jumlah		27	36		2	52	9
Total		**63**		**63**			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3. Berdasarkan Agama

Tabel 3.5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama

Kondisi 31 Mei 2025

NO	UNIT KERJA	AGAMA				
		KP	KK	Islam	Hindu	Budha
1.	Sekretariat	6	5	1	-	-
2.	Bidang Anggaran	5	6	-	-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	6	6	1	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	6	7	1	-	-
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	10	1	1	1	-
Jumlah		33	25	4	1	-
Total		**63**				

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

4. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.6

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum

Kondisi 31 Mei 2025

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D.I II/ III	D.IV	S1	S2
1.	Sekretariat	-	-	2	-	1	7	2
2.	Bidang Anggaran	-	-	-	1	-	7	3
3.	Bidang Perbendaharaan	-	-	-	3	-	9	1
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	7	6
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	3	-	1	5	4
Jumlah		-	-	5	5	2	35	16
Total		**63**						

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

5. Tenaga Kontrak

Tabel 3.7.

Komposisi Tenaga Kontrak Daerah

Kondisi 31 Mei 2025

NO	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	38
2	PEREMPUAN	30
Total		**68 orang**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah

1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2025, Target Pendapatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebesar **Rp. 3.231.595.017.857,-**. Berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah kondisi 31 Mei 2025:

Tabel. 3.8

Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah

Kondisi 31 Mei 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.231.595.017.857	1.177.644.115.445	36,44
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	119.519.178.857	71.995.353.101	60,24
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857	38.737.314.988	61,96
4.1.03.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal	62.519.178.857	38.737.314.988	61,96

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	pada BUMN			
4.1.03.01.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	62.250.000.000	38.737.314.988	61,96
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	269.178.857		
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	57.000.000.000	33.258.038.113	58,35
4.1.04.05.	Jasa Giro	5.000.000.000	3.174.257.651	63,49
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	3.174.257.651	63,49
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	3.174.257.651	63,49
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	1.000.000.000	882.431.533	88,24
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000	882.431.533	88,24
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000	882.431.533	88,24
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	30.000.000.000	669.276.565	2,23
4.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	30.000.000.000	669.276.565	2,23
4.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	30.000.000.000	669.276.565	2,23
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000	100.516.595	1,01
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas	10.000.000.000	100.516.595	1,01

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000	100.516.595	1,01
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	11.000.000.000	28.431.555.768	258,47
4.1.04.15.01.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN	1.000.000.000		
4.1.04.15.01.0001.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN	1.000.000.000		
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK			
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK			
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	10.000.000.000	28.431.555.768	284,32
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000.000	28.431.555.768	284,32
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.112.075.839.000**	**1.105.542.687.344**	**35,52**
4.2.01.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**3.112.075.839.000**	**1.105.542.687.344**	**35,52**
4.2.01.01.	**Dana Perimbangan**	**3.112.075.839.000**	**1.105.542.687.344**	**35,52**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.1.01.06	Insentif Fiskal	6.700.771.000		
4.2.1.01.06.02.01	Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun sebelumnya	6.700.771.000		
4.2.01.07.01.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	61.652.427.000	14.142.698.700	
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.059.812.000	1.173.153.000	28,90
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	48.258.335.000	12.064.583.750	25,00
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.760.954.000	517.396.750	6,67
4.2.01.01.01.0007.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.046.825.000	418.730.000	40,00
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	397.747.000	159.098.800	40,00
4.2.01.07.02.0007.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	90.312.000	36.124.800	40,00
4.2.01.07.02.0008.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DR)	38.442.000	3.844.200	10,00
4.2.01.01.02.	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**2.029.253.589.000**	**758.609.363.035**	**37,38**
4.2.01.01.02.0001.	DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.542.866.521.000	667.991.352.035	43,30
4.2.01.01.02.0004	DAU tambahan dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK	184.327.030.000	-	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yg ditentukan penggunaanya bidang Pendidikan	260.918.641.000	78.275.592.000	30,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yg ditentukan penggunaanya bidang Kesehatan	41.141.397.000	12.342.419.000	30,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yg ditentukan penggunaanya bidang Pekerjaan Umum			-
4.2.01.01.03.	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**51.732.870.000**	-	-

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.01.03.0004.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	33.415.284.000	-	0,00
4.2.01.01.03.0005.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	321.800.000	-	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler Penguatan Kesehatan	17.995.786.000	-	0,00
4.2.01.01.04.	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**962.736.182.000**	**332.560.393.009**	**358,61**
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	495.437.539.000	247.709.706.500	50,00
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	10.931.750.000	-	0,00
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	419.218.077.000	77.291.710.605	18,44
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	8.472.748.000	-	0,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	16.318.485.000	3.528.855.825	21,62
4.2.01.01.04.0009.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.881.156.000	904.522.400	48,08
4.2.01.01.04.0010.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000	931.572.427	46,58
4.2.01.09.02.0022.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	450.742.000	-	0,00
4.2.01.09.02.0032.	Bantuan Operasional Kesehatan	6.883.685.000	1.644.025.252	23,88
4.2.01.09.02.0039.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200.000.000	100.000.000	50,00
4.2.01.09.02.0041.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000.000	375.000.000	50,00
4.2.01.09.02.0042.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	42.000.000		0,00
4.2.01.09.02.0043.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	150.000.000	75.000.000	50,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		106.075.000	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	106.075.000	-
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	106.075.000	-
4.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	106.075.000	-
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-
4.3.01.04.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-
4.3.01.03.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan	-	106.075.000,00	-
	JUMLAH	3.231.595.017.857	1.177.644.115.445	36,44

Sumber Bidang Perbendaharaan (BUD)

2. Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025, Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 686.415.955.776,-** Pagu dan Realisasi Anggaran tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah

Kondisi 31 Mei 2025

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						KEUANGAN	686.415.955.776	3.854.260.563	0,56%
0	0	0	2			Badan Keuangan Daerah	686.415.955.776	3.854.260.563	0,56%
0	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.348.841.404	1.812.112.365	8,91%
1	1	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401.244.096	95.565.816	23,82%
1	1	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.246.000	36.023.516	55,21%
1	1	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	91.310.800	14.337.100	15,70%
1	1	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.903.727	27.856.000	36,22%
1	1	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.433.569	17.349.200	22,70%
1	1	0	1	0	8	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	41.350.000		0,00%
1	1	0	1	0	10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000		0,00%
1	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.675.996.182	432.369.025	3,16%
1	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.184.296.582		0,00%
1	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600	262.214.500	12,96%
1	1	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000	61.596.625	41,06%
1	1	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000	9.449.000	12,54%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.423.000	42.980.700	77,55%
1	1	0	2	0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	65.519.000	39.238.200	59,89%
1	1	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.509.000	16.890.000	22,37%
1	1	0	2	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000		0,00%
1	**1**	**0**	**3**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20.000.000**	**4.264.000**	**21,32%**
1	1	0	3	0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000		0,00%
1	**1**	**0**	**3**	**0**	**5**	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**10.000.000**	**4.264.000**	**42,64%**
1	**1**	**0**	**5**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**232.158.000**	**61.816.203**	**26,63%**
1	1	0	5	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141.079.000	48.913.823	34,67%
1	1	0	5	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000	12.902.380	14,17%
1	1	0	5	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
1	1	0	5	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
1	**1**	**0**	**6**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.455.980.242**	**558.976.805**	**38,39%**
1	1	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.709.000	300.000	1,08%
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.189.000	785.956	3,00%
1	1	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	355.243.520	146.797.376	41,32%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.500.000	18.260.000	34,78%
1	1	0	6	0	7	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000	99.340.150	49,67%
1	1	0	6	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	424.792.286	216.931.523	51,07%
1	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.640.000	76.561.800	22,68%
1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436		0,00%
1	**1**	**0**	**7**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**540.679.000**	**214.619.315**	**39,69%**
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	38.824.000	4.056.200	10,45%
1	1	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	501.855.000	210.563.115	41,96%
1	**1**	**0**	**8**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.671.463.884**	**350.367.500**	**9,54%**
1	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.565.400	5.027.500	14,54%
1	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000	250.000.000	33,33%
1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.886.898.484	95.340.000	3,30%
1	**1**	**0**	**9**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**351.320.000**	**94.133.701**	**26,79%**
1	1	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000	82.689.401	34,92%
1	1	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.500.000	11.444.300	10,00%
1	1	0	9	0	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
0	**2**					**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**666.067.114.372**	**2.042.148.198**	**0,31%**
2	**2**	**0**	**1**			**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**8.730.834.177**	**961.565.711**	**11,01%**

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	301.751.000		0,00%
2	2	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	344.547.000		0,00%
2	2	0	1	0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	147.314.000	106.590.682	72,36%
2	2	0	1	0	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	367.722.800		0,00%
2	2	0	1	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.634.548.112		0,00%
2	2	0	1	0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.903.975.413	724.401.029	24,95%
2	2	0	1	0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.030.975.852	130.574.000	6,43%
2	2	0	2			**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	1.947.777.005	151.093.750	7,76%
2	2	0	2	0	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			
2	2	0	2	0	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	406.438.000		0,00%
2	2	0	2	0	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	407.968.000		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						Kabupaten/Kota			
2	2	0	2	0	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	452.694.000		0,00%
2	2	0	2	0	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	579.470.500	91.290.000	15,75%
2	2	0	2	0	6	sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah			
2	2	0	2	0	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	41.398.000	32.728.750	79,06%
2	2	0	2	0	8	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			
2	2	0	2	0	9	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	2	0	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
2	2	0	2	0	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	2	0	2	0	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsilidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Deareh	59.808.505	27.075.000	45,27%
2	**2**	**0**	**3**			**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**1.766.443.796**	**368.636.255**	**20,87%**
2	2	0	3	0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	344.944.296	144.606.380	41,92%
2	2	0	3	0	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	234.557.600	48.991.000	20,89%
2	2	0	3	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	364.648.400		0,00%
2	2	0	3	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	477.582.200	175.038.875	36,65%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
2	2	0	3	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	344.711.300		0,00%
2	2	0	3	0	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
2	2	0	4			**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**2.494.907.652**	**560.852.482**	**22,48%**
2	2	0	4	0	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			
2	2	0	4	0	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	330.735.212	165.006.790	49,89%
2	2	0	4	0	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	423.726.990	153.313.000	36,18%
2	2	0	4	0	4	konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	733.939.150	242.532.692	33,05%
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala	1.006.506.300		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			
2	2	0	4	0	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
2	2	0	4	0	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			
2	2	0	5			**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	651.127.151.742	162.311.632.054	24,93%
2	2	0	5	0	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484		0,00%
2	2	0	5	0	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	39.242.079.847		0,00%
2	2	0	5	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.634.011.146		0,00%
2	2	0	5	0	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	554.044.137.265		0,00%

Sumber : SPJ Belanja – Fungsional Mei 2025

B. Kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Sampi dengan 31 Mei 2025, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari 13 kegiatan dan 74 sub kegiatan dimana setiap kegiatan dan sub kegiatan terbagi dalam 2 (dua) program, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini secara teknis menjadi tanggungjawab Sekretariat Badan Keuangan Daerah adapun Pagu sebesar Rp. 20.348.841.404,- Terealisasi sebesar Rp. 1.812.112.365,- dengan presentase (8,91%);

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD

Sub Bagian PDE bertanggungjawab untuk menangani kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah, dan Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah. Pagu sebesar Rp. 401.244.096,- Realisasi sebesar Rp. 95.565.816,-(23,82%).Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇨ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- ⇨ Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- ⇨ Terlaksananya Pelaporan Realisasi Keuangan dann fisik serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target RPSMD secara tahunan, pencapaian renstra secara tahunan,dan target indikator secara bulanan dan triwulan kepada Bapperida melalui aplikasi e. Monev performance.
- ⇨ Terlaksananya Beberapa fungsi dari pimpinan berupa:
  a. Penyusunan materi rapat.
  b. Mewakili pimpinan untuk mengikuti rapat maupun kegiatan lainnya.
  c. Tugas-Tugas Lainnya.

b. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Pagu sebesar Rp.13.675.996.182,- Realisasi Rp. 432.369.025,-(3,16%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇨ Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan.
- ⇨ Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal.
- ⇨ SPP/SPM-GU kepada pengguna Anggaran.
- ⇨ SPP/SPM-GU kepada BUD.
- ⇨ SPJ fungsional kepada PPK SKPD untuk divirifikasi.
- ⇨ SPJ Administrasi kepada PPK SKPD untuk divirifikasi.
- ⇨ Pengisian buku cek dan pengembalian tunai uang kas di Bank .
- ⇨ Menerima dan menyimpan uang persedian .
- ⇨ Membukukan penyetoran atas pungutan Pajak.
- ⇨ Membuat rekapitulasi data realisasi belanja bunga,belanja DBH,bantuan keuangan dan BTT.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 20.000.000,- Realisasi Rp 4.264.000.- (21,32%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇨ Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah.
- ⇨ Tersusunnya rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

yang terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu sebesar Rp. 232.158.000,- Realisasi Rp. 61.816.203,- (26,63%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇨ Tersusunnya Laporan Budaya Kerja.
- ⇨ Penyelesaian Dokumen Kenaikan Pangkat.
- ⇨ Penyelesaian Dokumen Pensiun.
- ⇨ Tersusunnya Laporan Presentasi Kehadiran.
- ⇨ Pengusulan Pensiun.
- ⇨ Penyusunan Laporan Implementasi SPBE Tahun 2023.
- ⇨ Pengusulan Kenaikan Pangkat .
- ⇨ Penginputan Anjab ABK Tahun 2025 Pada Aplikasi Sinjab 3.8.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Umum PD yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 1.455.980.242,- Realisasi Rp. 558.976.805,-(38,39%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇨ Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
- ⇨ Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.
- ⇨ Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- ⇨ Tersedianya Bahan/Material.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu sebesar Rp. 540.679.000,-Realisasi Rp.214.619.315 ,- (39,69%).

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi. Pagu sebesar Rp. 3.671.463.884,- Realisasi Rp. 350.367.500,- (9,54%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

⇨ Tersedianya Jasa Surat Menyurat.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu sebesar Rp 351.320.000,- Realisasi Rp. 94.133.701,- (26,79). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇨ Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditangani oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dari pagu sebesar Rp. 666.067.114.372,- Realisasi Rp. 2.042.148.198,- Presentase (0,31%). Berikut adalah realisasi kinerja per kegiatan :

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dengan Pagu sebesar Rp. 8.730.834.177,- Realisasi Rp. 961.565.711,- (11,01%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
6. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
7. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA;
8. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD.
9. Konsultasi terkait RKA Pergeseran Tahun Anggaran 2025 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
10. Konsultasi terkait Pergeseran DPPA UPTD Tahun Anggaran 2025 (UPTD Veteriner);
11. Konsultasi terkait Dana Insentif Daerah 2025 (Dinas sosial);
12. Konsultasi terkait RKA perubahan (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral);
13. Konsultasi terkait Perubahan Anggaran (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
14. Konsultasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Januari 2025 (Dinas Kesehatan);
15. Konsultasi terkait Aplikasi SIPD Penatausahaan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana);

Tabel 3.10

Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah

Kondisi 31 Mei 2025

Program	Rincian Kegiatan	Target (dokumen/kegiatan /buku)	Realisasi (dokumen/kegiatan /buku)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi penyusunan dan verifikasi Dokumen Perubahan DPA-SKPD TA. 2025	- Proses Stempel dan Pembagian Dokumen Perubahan Pertama DPA-SKPD TA. 2025	Dokumen Perubahan Pertama DPA-SKPD TA. 2025	Terealisasi
	2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Rapat terkait Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Kebijakan Belanja serta Rincian RKA	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Membuat Laporan Rencana Sisa DAU Spesifik Grant Penggajian PPPK Tahun Anggaran 2024	Kegiatan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Proses Pencetakan Dokumen Peraturan	Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 17	Terealisasi

		Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun2024 Penjabaran APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025	Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun2024 Penjabaran APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025	
		- Proses Pencetakan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 77A Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025	Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 77A Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025	Terealisasi
	3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	- Melakukan simulasi Pemetaan untuk Kegiatan KUA PPAS TA. 2025	Pemetaan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi

b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp.1.947.777.005,- Realisasi Rp. 151.093.750,- (7,76%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11

Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Kondisi 31 Mei 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /RINCIAN KERJA	BENTUK/ WUJUD	REALISASI	KETERANGAN
PROGRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
KEGIATAN : PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2025
B.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2025
C.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2025

	Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
D.	Sub kegiatan : Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatannya yaitu Rapat Koordinasi Keuangan Daerah			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025
	1. Menyiapkan administrasi pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: a. Kerangka acuan kegiatan. b. Surat Undangan Ke Kab/Kota. c. Surat Permintaan Narasumber (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri,BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BAPPERINDA, Kepala Dinas Nakertrans). d. Jadwal kegiatan. e. Susunan acara welcome diner.	dokumen dan surat-surat administrasi dalam rangka pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah	Telah selesai diproses dan untuk surat-surat telah dikirimkan sesuai peruntukkannya	

	f. Laporan Panitia Penyelenggara. g. Sambutan . h. Materi Kepala Badan Keuangan Daerah Prov NTT i. Materi Diskusi Kelompok (PenganggaranPelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Aset)			
	2. Sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota	List rekapan LRA Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan bulan Mei 2025 sebanyak 1 (satu) dokumen	1 (satu) list rekapan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kemendagri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT serta Kantor DJP Pajak Pratama	Berlanjut untuk LRA bulan Juni Tahun 2025 yang akan dilaporkan di bulan Juli Tahun 2025

	4. Menyusun Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023	Draf daftar/list Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.	Draf data Statistik Keuangan Daerah ahun 2023	Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya
E.	Sub kegiatan : Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			Telah selesai dilaksanakan pada bulan Februari 2025
F.	Asistensi Pengelolaan Keuangan DBH-CHT Kab/Kota			
	1. Koordinasi penandatangan Berita Acara DBH-CHT dan Penyelesaian RKP DBH CHT TA 2025	Berita Acara DBH CHT dan RKP DBH CHT 2025 sebagai syarat salur	Telah di tandatangani Berita Acara dan penyampaian RKP DBH CHT TA 2025 22 kab/kota	
G.	Sub kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Penyusunan laporan kegiatan bulan Mei 2025	Laporan kegiatan kegiatan bulan Mei 2025	Disampaikannya laporan kegiatan bidang pembinaan kab/kota bulan Mei 2025 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Berlanjut Laporan kegiatan bulan Juni yang dilaporkan di bulan Juli
	2. Pelaksanaan Rapat konsultasi dan koordinasi dari Pemerintah kabupaten TTS Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Kantor Bea Cukai terkait Berita Acara DBH - CHT Bidang Penegakkan Hukum	Rapat konsultasi dan koordinasi dari Pemerintah kabpaten TTS Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Kantor Bea Cukai	Terinformasinya berbagai hal terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	Rapat dengan Bea Cukai dilaksanakan pada pada hari kamis, 22 Mei 2025 dan Rabu, 28 Mei 2025 Rapat dengan Pemkab TTS pada

	(Gakum)	terkait Berita Acara DBH- CHT Bidang Penegakkan Hukum (Gakum)		hari Selasa, 27 Mei 2025 di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
H.	Tugas Tambahan : Melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rincian :			
	1. Penyelesaian administrasi umum dan kepegawaian (Kenaikan Berkala, SKP Tahun 2023 maupun SKP Tahun 2024)	Dokumen SKP, Kenaikan Berkala dan SKP 2024	Tersedianya 3 jenis dokumen untuk ditindaklanjuti secara berkala.	Berlanjut untuk bulan April 2025
	2. Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tersedianya 1 (satu) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	

c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Perbendaharaan dengan Pagu sebesar Rp. 1.766.443.796,- Realisasi Rp. 368.636.255,- (20,87%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

1. Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
   Saldo awal Rp. 644.071.500.274,05 realisasi Penerimaan sebesar Rp. 598.933.930.914,21 sedangkan Realisasi Pengeluaran sebesar Rp. 693.736.100.204,16,- dan sisa saldo RKUD per 31 Mei 2025 sebesar Rp.549.269.330.984,10
2. Saldo Deposito Rp. 175.000.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- Bank BNI Rp. 60.000.000.000,-
- Bank BRI Rp. 60.000.000.000,-
- Bank Mandiri Rp. 35.000.000.000,-
- Bank NTT Rp. 20.000.000.000,-

3. Realisasi Keuangan khusus Bidang Perbendaharaan dengan anggaran sebesar Rp.2.382.903.796,- terealisasi Rp. 180.721.255,- atau 8 % yang terdiri dari:
   a. Sub Kegiatan 02.1.03.0001 Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah terealisasi Rp. 144.606.380,- atau 42 % dari anggaran sebesar Rp.344.944.296,-
   b. Sub Kegiatan 02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD terealisasi Rp. 48.991.000,- atau 21 % dari anggaran sebesar Rp.234.557.600,-
   c. Sub Kegiatan .02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya anggaran sebesar Rp.364.648.400,-
   d. Sub Kegiatan 02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah terealisasi Rp. 175.038.875,- atau 37 % dari anggaran sebesar Rp.477.582.200,-
   e. Sub Kegiatan 02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas anggaran sebesar Rp.344.711.300,-
   f. Sub Kegiatan 02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan anggaran sebesar Rp. 0,-

Tabel 3.12

Hasil Pelaksanaan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah

Kondisi 31 Mei 2025

PROGRAM	KEGIATAN	BENTUK/WUJUD	REALISASI	KET
Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Menerima, memverifikasi dan memproses SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemprov. NTT dan selanjutnya diproses menjadi SP2D.	Belanja Daerah Terdiri Dari SP2D : 236 Doc LS Gaji PNSD & Guru (Gaji Induk) 35 Doc LS Terusan gaji 12 Doc LS Kekurangan Gaji 1 Doc LS Gaji Susulan 4 Doc LS Gaji PPPK 3 Doc LS Belanja Transfer 2 Doc LS Modal 3 Doc GU 28 Doc LS TPP 39 Doc LS Susulan TPP 3 Doc LS TPP Purna Bhakti 12 Doc LS TPP PPPK 4 LS Honorer 43 Doc LS DPRD 2 Doc LS Barang dan Jasa 21 Doc LS Kekurangan Tj. Beras 1 Doc	
		Membuat Laporan Bulanan tentang : - Data Belanja Gaji Pegawai	SuratPengantar :	

		dan TPP Bulan April Tahun Anggaran 2025 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) - Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Bulan April Tahun Anggaran 2025 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Ke Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	1. 900.1/884/BKUD3.1 Tgl. 05 Mei 2025	
		Membuat SKPP (Pensiun BUP, Pensiun Dini, Janda Duda dan Pindah)	SKPP BUP Doc : 42 Doc SKPP Meninggal : 5 Doc SKPP pindah : 1 Doc	
		Menginput Perubahan data Gaji PNSD dan Guru SMA/SMK se Prov. NTT	Perubahan Gaji, Berkala/Naik Pangkat: PNS (SKPD) :160 Orang PNS Guru :497 Orang PPPK Tahap I :3 Orang PPPK Tahap II :7 Orang	

			PPPK P1 :4 Orang	
		Pembayaran Gaji Rutin Bulanan bagi PNS Lingkup Pemprov. NTT TA. 2025	- Verfikasi berkas - Penginputan data dalam Aplikasi SIM Gaji Taspen - Pencetakan Daftar Gaji - Pencetakan SP2D - Realisasi Pembayaran	
		Mengentri Buku Bantu Rekening Kas Daerah Provinsi NTT	Penerimaaan : 4.296 Doc Pengeluaran : 213 Doc	
		Menginput Data Bukti Setoran dan SP2D dalam B IX	4.296 Doc	
		Melakukan Rekapitulasi dan penyetoran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), yang terdiri dari beras, Taspen, Iuran Kesehatan, Iuran Ketenaga kerjaan, PPh Ps. 21, Taperum, PPN dan PPh Ps. 22	PNS pada 41 OPD Lingkup Pemprov. NTT,OPD Pengalihan 3 Kab/Kota dan Guru SMA/SMK Pengalihan 22 Kab/Kota	
		Melakukan verifikasi terhadap SP2D yang akan dilakukan pencairan	213 SP2D	
		Melakukan pengiriman Daftar	Surat Pengantar Nomor : 900.1.13.1/948/BKUD3.1	

		Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Bulan April 2025 ke KPP Pratama Kupang	Tanggal 14 Mei 2025	
		Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, bukti billing iuran wajib pegawai dan bukti billing iuran asuransi kesehatan bulan April 2025	Surat Pengantar Nomor : 1. 900.1/905/BKUD3.3/2025 7 Mei 2025 (BPJS) 2. 900.1/903/BKUD3.3/2025 Tgl . 07 Mei 2025 (TASPEN)	
	Pengagendaan Surat	Surat Masuk Surat Keluar	Total = 125 Surat Total = 16 Surat	
		Melakukan pengiriman bukti pembayaran beras ke Bulog Bulan Februari 2025	33 Setoran	
		Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Prov. NTT Keadaan Mei 2025	LHP BPK RI (23 kasus) Nominal Rp. 27.442.586,- LHP Inspektorat Daerah Prov. NTT (12 kasus) Nominal Rp. 1.657.016.231,- Kelebihan Tj. Keluarga PNS Model C (88 Kasus) Nominal Rp. 797.529.660,-) Rincian terlampir	
		Penginputan perubahan gaji tanggal 1-10	Tepat waktu	

		setiap bulannya pada SIM Gaji Web		
		Operator pada Aplikasi Gaji melakukan Print daftar gaji	Untuk dibayarkan pada gaji bulan Juni	
		Pelaporan DAU harus di upload melalui aplikasi SINERGI (sofcopy & hardcopy) yang sudah ditandatangai dan cap basah oleh pejabat yang berwenang, pengiriman paling lambat tanggal 14 setiap	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah terlambat menyampaikan laporan DAU	
		bulannya. Apabila tidak dipenuhi maka penyampaian DAU bulan berikutnya di tunda		
		Penyusunan Laporan Progres Penyerapan Dana Pinjaman Ekonomi (PEN) Daerah antara PT. SMI dan Pemprov.	Selalu tepat waktu	

		NTT yang dikirim paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut harus terlebih dahulu sudah di reviu oleh Inspektorat daerah sebelum dikirim ke PT. SMI melalui aplikasi REVINA		

d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Pagu sebesar Rp. 2.494.907.652,- Realisasi Rp 560.852.482,- (22,48%) . Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

1. DAP Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2025

   Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari sub – sub kegiatan antara lain :

   a. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran kas Daerah dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 terealisir senilai Rp. 0,00,- atau 0 %.
   b. Sub kegiatan rekonseliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja,pembiayaan.pendapata-lO, dan beban jumlah anggaran sebesar Rp. 330.735.212,- sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 terealisir Rp.120.683.790,- atau (36,49%).

c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.423.726.990,- dan sampai dengan 31 Mei 2025 realisasi Sebesar Rp.153.313.000,- Atau (35,71%).

d. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 733.939.150,-sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 terealisir sebesar Rp.203.639.792,- atau (27,75%).

e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, dianggarkan sebesar Rp.1.006.506.300,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Mei sebesar Rp.0,00,- atau 0%.

f. Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan paduan teknis oprasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan 31 Mei 2025 realisasi Sebesar Rp.0,00,- Atau 0% Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

g. Sub Kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertangungjawaban Pemerintah Provinsi dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan 31 Mei 2025 realisasi Sebesar Rp.0,00,- Atau 0% .

Tabel 3.13

Realisasi Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kondisi per 31 Mei 2025

Program	Rincina Kegiatan	Target (dokumen/ kegiatan)	Realisasi (dokumen/ kegiatan)	Ket
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	1. Sub kegiatan rekonseliasi dan ferifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja,pembiayaan.pendapata-lO, dan Beban	3 Laporan		
	2. Sub kegiatan koordinasi penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan semesteran .	3 Dokumen 1. Laporan Bulanan. 2. Laporan Triwulan. 3. Laporan semester.		
	3. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Dokumen 1. 35 Lk SKPD 2. 4 Lk BUMD 3. 1 LKPD		
	4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	4 Dokumen 1. Ranperda 2. Ranpergub 3. Perda 4. Pergub		

Program	Rincina Kegiatan	Target (dokumen/ kegiatan)	Realisasi (dokumen/ kegiatan)	Ket
	Pelaksanaan APBD Provinsi NTT			

e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Sub Bagian Keuangan, terdiri dari Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Pagu sebesar Rp. 651.127.151.742,- Realisasi Rp 162.311.632.054,- (24,93%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:
Laporan hasil Analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah daerah .

⇨ Laporan Hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan.

⇨ Laporan hasil pengelolaan darurat dan mendesak .

BAB IV
PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1 Permasalahan dan Solusi

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Permasalahan

1. Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga terjadi keterlambatan.
2. Arsip data masing-masing pegawai belum terkumpul seluruhnya. Hal ini dikarenakan pegawai yang bersangkutan belum menyerahkan arsipnya pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Penanganan disiplin pegawai belum optimal. Beberapa kasus pegawai yang tidak disiplin sering kali terlambat dilaporkan, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih rumit.

b. Solusi

1. Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat satu minggu setelah diminta.
2. Ditambah dana untuk bimtek dan diklat untuk seluruh pegawai
3. selalu menyampaikan informasi terkait pengumpulan kelengkapan arsip data pegawai melalui Nota Dinas maupun WA grup
4. Memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pegawai yang indispliner.
5. Atasan langsung rutin melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawai pada unit kerjanya, dan segera melaporkan kepada Kasubag Kepegawaian dan Umum apabila terdapat pegawai di unitnya yang melakukan tindakan indispliner
6. Perlu adanya penyampaian informasi dan rekomendasi dari atasan agar setiap pegawai memiliki minat dan semangat untuk

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui Bimtek maupun Diklat.

2. Bidang Anggaran

a. Permasalahan

1. Permasalahan yang dihadapi terkait Keterlambatanm Penyampaian RKA hasil Rasionalisasi/Efisiensi dari SKPD sehingga proses Pengginputan Mengalami Keterlambatan dari Jadwal yang telah ditetapkan.
2. Permasalahan yang Dihadapi terkait Batas Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Rancangan Penggunaan Anggaran Sisa DAU Spesifik Grant Penggajian PPPK Tahun Anggaran 2024 Merupakan Syarat Penyaluran DAU Spesifik Grant PPPK Tahun Anggaran 2025 namun SKPD Pengelola DAU Spesifik Grant tersebut terlambat menyampaikan Laporan dimaksud.

b. Solusi

1. Tim kerja bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD guna mendorong percepatan proses penginputan RKA SKPD agar Proses Perubahan/Pergeseran Peraturan Gubernur APBD Pertama dapat dilakukan sesuai Jadwal yang telah ditetapkan.
2. Tim kerja bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD pengelola DAU Spesifik Grant Penggajian PPPK guna mendorong percepatan penyusunan penggunaan anggaran Sisa DAU Spesifik Grant agar dapat segera disampaikan Laporannya kepada Kementrian Keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan.

3. Bidang Perbendaharaan

a. Permasalahan

1. TPP Januari sampai Maret sudah bisa dibayarkan, masih terdapat OPD yang belum melakukan pengajuan TPP Februari dan Maret pada aplikasi SI TPP
2. BPKP Perwakilan Prov. NTT akan melakukan Evaluasi Transfer Fiskal Daerah pada Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021- 2025
3. Pelantikan Pimpinan OPD harus dilakukan penyesuaian PA pada Aplikasi SIPD

b. Solusi

1. Pengelola pada bidang perbendaharaan sudah berkoordinasi dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera mengajukan TPP Februari-Maret pada aplikasi SI TPP untuk diverifikasi.
2. Dilakukan rapat untuk persiapan pemeriksaan BPKP pada Kamis, 8 Mei 2025 pukul 10.00 WITA di ruang rapat Sekretaris Daerah Prov. NTT yang diikuti oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Prov. NTT dan BPKP Perwakilan Prov. NTT.
3. Bidang Perbendaharaan melakukan penyesuaian PA pada Aplikasi SIPD.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Permasalahan

Terkait pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Akuntansi dan Pelaporan tidak ada. Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Akuntansi dan pelaporan, penyerapan anggaran per 31 Mei 2025 untuk bidang akuntansi dan pelaporan sudah sesuai kondisi riil, mengikuti schedule/waktu pelaksanaan program/kegiatan.

5. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

a. Permasalahan

1. Belum tepat waktu Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2025;

2. Belum tepat waktunya beberapa Kabupaten dan Kota dalam menyampaikan *hard copy* dan *soft copy* Perda dan Perbup APBD Tahun Anggaran 2025. Kabupaten yang belum menyampaikan *hard copy* yakni: Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai Timur, Kota Kupang dan Kabupaten Ende. Kabupaten yang belum menyampaikan *soft copy* yakni Kabupaten Rote Ndao sudah namun pada lampiran belum ada pengesahan pejabat yang berwenang;
3. Belum tepatnya kab/kota menyampaikan data terkait anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun 2024 dalam rangka evaluasi RAPBD Tahun Anggaran 2024.
4. Belum tepatnya kab Ende menyampaikan data terkait LKPD unaudited Tahun Anggaran 2024.
5. Hampir sebagian besar pemerintah kab/kota yang belum menerapkan transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

b. Solusi

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap bulan, data anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 s/d 2024, LKPD unaudited Tahun Anggaran 2024, sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.
2. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyampaikan *hard copy* dan *soft copy* Perda dan Perbup APBD TA 2025, data anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 s/d 2024, serta LKPD unaudited Tahun Anggaran 2024, sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.bagi kabupaten yang belum menyampaikan.

3. Pemerintah Provinsi juga akan tetap melaksanakan fungsi pembinaan kepada kab/kota yang belum memulai proses transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah.

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah ini disusun, sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025. Hal-hal lain yang belum dimuat dalam panduan ini akan dibahas saat evaluasi berlangsung.

Kupang, Juni 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. BENHARD MENOH,MT
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19720512 199101 1 001